PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Akbarudin

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus	Kepala Dinas Sosial Provinsi
Ibukota Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pramono Anung	Iqbal Akbarudin
	NIP 197301151998031003

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : **Iqbal Akbarudin**

NIP : **197301151998031003**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Unit Kerja : **Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Peranan Sosial	Sistem Perencanaan Tahunan	Indeks Peranan Sosial merupakan salah satu dimensi dalam kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) yang mengukur kemampuan individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Indeks ini terdiri dari tiga variabel: (1) Partisipasi – keputusan, kontrol, dan keikutsertaan dalam masyarakat (2) Kohesi Sosial – relasi, keterhubungan, kepatuhan, kesetaraan, dan kualitas hidup (3) Kelembagaan Inklusif – perlindungan aset, kepastian hukum, kebijakan inklusif, dan insentif ekonomi. Indeks ini menjadi acuan perencanaan untuk meningkatkan peran masyarakat umum maupun rentan dalam organisasi, kebijakan, maupun kepastian hukum. Regulasi Acuan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 3. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia 4. PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan	N/A	N/A	N/A	59,13	59,13	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas 5. Permensos no 13 tahun 2020 6. Permensos No. 2 Tahun 2024 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial 7. Keputusan Menteri Sosial No. 143/HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial 8. Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial. Aspek yang diukur dalam Indeks Peranan Sosial: Partisipasi: keikutsertaan dan kontrol masyarakat dalam kebijakan serta kontribusi sosial. Kohesi sosial: relasi sosial, keterhubungan, kepatuhan sosial, kesetaraan, kualitas hidup. Kelembagaan inklusif: kepastian hukum, kebijakan inklusif, dan insentif ekonomi. 1. Setiap indikator dikonversi ke skala 0–1 melalui standarisasi Kemensos. Proses standarisasi dilakukan sesuai pedoman teknis pengukuran Ikesos yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 2. Nilai indikator dalam suatu variabel dihitung dengan menjumlahkan nilai capaian indikator dibagi jumlah indikator 3. Nilai variabel dalam suatu dimensi dihitung dengan menjumlahkan nilai capaian variabel dibagi	N/A	N/A	N/A	59,13	59,13	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				jumlah variabel. 4. Nilai dimensi dalam suatu indeks dihitung dengan menjumlahkan nilai dimensi yang dibagi kedalam bobotnya. Sebagai salah satu dimensi dalam Ikesos, peranan sosial memiliki bobot 31% dalam penghitungan Indeks Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan. 5. Pada tingkat provinsi, nilai dihitung sebagai rata-rata nilai kabupaten/kota sesuai ketentuan penghitungan Ikesos nasional.	N/A	N/A	N/A	59,13	59,13	Indeks
2	Meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Sistem Perencanaan Tahunan	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar merupakan salah satu dimensi dalam kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) yang mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat umum maupun kelompok rentan. Dua variabel utama yang digunakan adalah Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, sesuai fokus DKI Jakarta dalam pemenuhan hak dasar. Dalam konteks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengukuran difokuskan pada variabel Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial sebagai instrumen utama pemenuhan hak dasar. Berdasarkan Pergub 44/2022, bantuan sosial adalah pemberian uang/barang oleh Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat secara selektif dan tidak terus-menerus untuk perlindungan sosial. Berdasarkan Pergub 15/2023, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin kebutuhan hidup layak seluruh rakyat. Indeks ini bermanfaat untuk menilai ketepatan sasaran serta mengukur besaran individu yang	N/A	N/A	N/A	65,4	65,4	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				masih membutuhkan dukungan kebutuhan dasar. Indeks ini juga menjadi bagian dari pengukuran dimensi kebutuhan dasar dalam Ikesos nasional dengan bobot 27% dari keseluruhan indeks. Regulasi Acuan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Keputusan Menteri Sosial No. 143/HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial 4. Rancangan Permensos tentang Pedoman Indeks Kesejahteraan Sosial Aspek yang diukur dalam Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Bantuan sosial: persentase individu penerima sesuai kebutuhan dibanding target penerima; Jaminan sosial: persentase individu memiliki jaminan sesuai kebutuhan dibanding target penerima. Penghitungan dilakukan terhadap masyarakat umum maupun kelompok rentan sesuai klasifikasi sasaran Ikesos. 1. Setiap indikator dikonversi ke skala 0–1 berdasarkan acuan Kemensos. Standarisasi dilakukan sesuai pedoman teknis pengukuran Ikesos	N/A	N/A	N/A	65,4	65,4	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 2. Nilai indikator dalam suatu variabel dihitung dengan menjumlahkan nilai capaian indikator dibagi jumlah indikatornya 3. Nilai variabel dalam suatu dimensi dihitung dengan menjumlahkan nilai capaian variabel dibagi jumlah variabel. 4. Nilai dimensi dalam suatu indeks dihitung dengan menjumlahkan nilai dimensi yang dibagi kedalam bobotnya, untuk kebutuhan dasar, bobot adalah 27% 5. Pada tingkat provinsi, nilai dihitung sebagai rata-rata nilai kabupaten/kota sesuai ketentuan penghitungan Ikesos nasional.	N/A	N/A	N/A	65,4	65,4	Indeks
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data :						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				BPKD						
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	perencanaan kinerja Dasar Hukum : a.) Peraturan Menteri Pembardayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun	90,66	90,66	90,66	90,66	90,66	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UPP b.) Peraturan Gubernur DKI Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik c.) Keputusan Gubernur DKI Nomor 426 Tahun 2022 tentang UPP Pelaksana SKM Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei						

Jakarta, 23 Februari 2026

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pramono Anung

Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Peranan Sosial	59,13	RA1. Melaksanakan pembentukan Tim Pengukuran Ikesos	KK1.1. Terlaksananya pembentukan Tim Pengukuran Ikesos	T/O1.1.1. Keputusan Gubernur terkait pembentukan Tim Pengukuran Ikesos	1 Dokumen	TW III
				RA2. Melaksanakan peningkatan peranan sosial terhadap masyarakat rentan	KK2.1. Melaksanakan peningkatan peranan sosial terhadap masyarakat rentan	T/O2.1.1. Laporan Data Kelompok rentan Mitra Dinas Sosial (Disabilitas/ Lansia) di Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.2. Laporan keterlibatan kelompok rentan dalam pelaksanaan forum perencanaan pembangunan Dinas Sosial	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.3. Laporan penanganan keterjadian kekerasan/ Bullying pada Masyarakat rentan	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.4. Laporan kelompok rentan (disabilitas/lansia) yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.5. Laporan kelompok rentan (disabilitas/lansia) yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan	1 Laporan	TW IV
				RA3. Melakukan penyusunan kebijakan terkait pemenuhan peranan sosial	KK3.1. Melakukan penyusunan kebijakan terkait pemenuhan peranan sosial	T/O3.1.1. Laporan Kebijakan (Perda/Pergub) yang mengatur tentang Disabilitas dan Lansia	1 Laporan	TW IV
						T/O3.1.2. Kajian Instrumen pembentukan Puskesos	1 Laporan	TW IV
						T/O3.1.3. Kepsekda terkait penanganan pengaduan terintegrasi untuk OPPKPKE	1 Dokumen	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA4. Melakukan pelibatan pilar sosial dalam meningkatkan pemenuhan peranan sosial	KK4.1. Terlibatnya pilar sosial dalam meningkatkan pemenuhan peranan sosial	T/O4.1.1. Laporan keterlibatan Pilar Sosial dalam meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	TW II
						T/O4.1.2. Laporan keterlibatan Pilar Sosial dalam meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	TW IV
						T/O4.1.3. Petunjuk Teknis peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	TW III
				RA5. Memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial	KK5.1. Terlaksananya pemberdayaan terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial	T/O5.1.1. Laporan kegiatan pemberdayaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	TW III
						T/O5.1.2. Laporan kegiatan pemberdayaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
2	Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar	65,4	RA1. Menyediakan Kebijakan Penetapan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	KK1.1. Tersediannya Kebijakan Penetapan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	T/O1.1.1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan dari DTSEN Desil 1-3	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.2. Draft Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Draft Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi dan Pemutakhiran DTSEN	1 Dokumen	TW II
				RA2. Melaksanakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjamin kehidupan masyarakat yang layak	KK2.1. Terlaksanakannya peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjamin kehidupan masyarakat yang layak	T/O2.1.1. Laporan penerima bantuan sembako/BPNT provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.2. Laporan penerima bantuan sembako/BPNT provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.3. Laporan penanganan stunting dalam ruang lingkup Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.4. Laporan penanganan stunting dalam ruang lingkup Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.5. Laporan Partisipasi Sekolah WBS pada Panti Sosial kewenangan Dinas Sosial	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						Provinsi DKI Jakarta		
						T/O2.1.6. Laporan Partisipasi Sekolah WBS pada Panti Sosial kewenangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.7. Laporan hasil pengusulan penerima bantuan jaminan kesehatan	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.8. Laporan hasil pengusulan penerima bantuan jaminan kesehatan	1 Laporan	TW III
						T/O2.1.9. Laporan hasil pengusulan penerima bantuan jaminan kesehatan	1 Laporan	TW IV
				RA3. Melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	KK3.1. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	T/O3.1.1. Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	1 Laporan	TW IV
				RA4. Melaksanakan Penanganan Keterjadian dan Korban Bencana	KK4.1. Terlaksananya Penanganan Keterjadian dan Korban Bencana	T/O4.1.1. Laporan kejadian bencana yang berisi data kejadian bencana dan korban bencana	1 Laporan	TW I
						T/O4.1.2. Laporan kejadian bencana yang berisi data kejadian bencana dan korban bencana	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O4.1.3. Laporan kejadian bencana yang berisi data kejadian bencana dan korban bencana	1 Laporan	TW III
						T/O4.1.4. Laporan kejadian bencana yang berisi data kejadian bencana dan korban bencana	1 Laporan	TW IV
				RA5. Menyusun Pedoman Skema Graduasi Penerima Bantuan Sosial dan melakukan pemantauan serta evaluasi graduasi penerima manfaat bantuan sosial berbasis multidimensi untuk mencegah fallback.	KK5.1. Tersusunnya pedoman skema graduasi penerima bantuan sosial	T/O5.1.1. Kepsekda Pedoman skema graduasi penerima bantuan sosial	1 Dokumen	TW II
					KK5.2. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi graduasi penerima manfaat bantuan sosial berbasis multidimensi	T/O5.2.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Graduasi Penerima Manfaat bantuan sosial	1 Laporan	TW IV
				RA6. Menyusun Standar pelayanan rehabilitasi sosial terpadu yang inklusif terhadap lansia dan disabilitas	KK6.1. Tersusunnya Standar pelayanan rehabilitasi sosial terpadu yang inklusif terhadap lansia dan disabilitas	T/O6.1.1. Pedoman Penyusunan standar pelayanan rehabilitasi sosial terpadu yang inklusif terhadap lansia dan disabilitas di seluruh unit layanan sosial	1 Dokumen	TW IV
				RA7. Menyediakan pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam panti	KK7.1. Terselenggarannya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam panti untuk memenuhi standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial di 22 panti	T/O7.1.1. Nota Dinas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada 22 Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima	1 Laporan	TW II
						T/O7.1.2. Nota Dinas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada 22 Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						Jakarta terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima		
				RA8. Menyediakan pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar panti	KK8.1. Terselenggarannya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar panti untuk memenuhi standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial	T/O8.1.1. Nota Dinas pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial luar panti	1 Laporan	TW II
						T/O8.1.2. Nota Dinas pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial luar panti	1 Laporan	TW IV
				RA9. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK9.1. Ditetapkannya Program Strategis oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	T/O9.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I
						T/O9.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW I
						T/O9.1.3. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O9.1.4. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW III
						T/O9.1.5. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW IV
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	1 Data	TW I
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki. jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data AKB target bulanan pada sistem sipkddki. jakarta.go.id	1 Data	TW I
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 %	TW IV
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK		
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	90,66	RA1. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil SKM sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	KK1.1. Terwujudnya peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW I
						T/O1.1.2. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW II
						T/O1.1.3. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW III
						T/O1.1.4. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan		
					KK1.2. Tersedianya hasil tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.2.1. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW I
						T/O1.2.2. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya		

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003